

## Analisis *Sustainability Report* Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik di Bursa Efek Indonesia Tahun 2023: Analisis Berdasarkan *Standar Global Reporting Initiative (GRI) 200*

Ghina Raudhatul Jannah <sup>\*1</sup>

Hudila <sup>2</sup>

Dira Sri Wahyuni <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

\*e-mail: [ghinaraudhatulj4@gmail.com](mailto:ghinaraudhatulj4@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengungkapan aspek ekonomi berdasarkan *Global Reporting Initiative (GRI) 200* yang mencakup standar *GRI 201* hingga *GRI 207* pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menganalisis 28 dari 39 perusahaan sektor transportasi dan logistik yang menerbitkan laporan keberlanjutan tahun 2023 dengan menggunakan metode analisis konten (*content analysis*) berdasarkan indikator *GRI 200*. Perusahaan relatif lebih konsisten mengungkapkan indikator *GRI 201-1* tentang nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan, meskipun banyak yang masih belum optimal. Sebaliknya, pengungkapan indikator lain dalam kelompok *GRI 200* masih menunjukkan kelemahan, di mana sebagian besar perusahaan tidak menyajikan informasi secara memadai, khususnya pada *GRI 207* mengenai perpajakan yang hampir seluruhnya tidak diungkapkan. Temuan ini menjadi relevan mengingat sektor transportasi dan logistik memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi nasional serta melibatkan interaksi ekonomi yang kompleks dengan berbagai pemangku kepentingan, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan sekaligus memperkaya kajian akademik mengenai kualitas pengungkapan aspek ekonomi berdasarkan standar *GRI 200*.

**Kata kunci:** Laporan keberlanjutan, *GRI 200*, sektor transportasi dan logistik

### Abstract

This study aims to analyze the disclosure of economic aspects based on the *Global Reporting Initiative (GRI) 200*, which includes *GRI Standards 201 to 207*, in companies within the transportation and logistics sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The study examines 28 out of 39 transportation and logistics companies that published sustainability reports in 2023, using content analysis based on *GRI 200* indicators. The findings indicate that companies tend to be more consistent in disclosing *GRI 201-1* regarding direct economic value generated and distributed, although the quality of disclosure remains suboptimal in many cases. In contrast, other indicators within the *GRI 200* series show significant weaknesses, as most companies provide limited or insufficient information, particularly for *GRI 207* on taxation, which is largely not disclosed. This issue is particularly relevant given the strategic role of the transportation and logistics sector in supporting national economic activities and its complex economic interactions with various stakeholders. Therefore, this study is expected to serve as an evaluative reference for companies and to contribute to the academic literature on the quality of economic disclosures based on the *GRI 200* standards.

**Keywords:** Sustainability report, *GRI 200*, transportation and logistics sector

### PENDAHULUAN

Perusahaan modern saat ini tidak lagi dinilai semata berdasarkan capaian finansial jangka pendek, tetapi juga oleh kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Praktik pelaporan keberlanjutan menjadi instrumen penting untuk menggambarkan akuntabilitas perusahaan kepada berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, sehingga mampu memperkuat transparansi informasi dan kepercayaan publik terhadap praktik bisnis (Mahesana & Ratnadi, 2025). Di tengah perkembangan itu, *Global Reporting Initiative (GRI)* menjadi kerangka standar yang paling banyak digunakan secara global untuk menyusun *sustainability report*, karena menyediakan indikator

sistematis yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Wicaksono & Bandiyono, 2025).

Dalam kerangka GRI, aspek ekonomi merupakan salah satu pilar utama yang penting untuk diungkapkan karena mencerminkan nilai ekonomi yang diciptakan perusahaan, distribusi manfaat kepada pemangku kepentingan, serta dampaknya terhadap sistem ekonomi yang lebih luas. Pengungkapan berbasis GRI tidak hanya menitikberatkan pada kinerja keuangan, tetapi juga pada kontribusi ekonomi perusahaan secara berkelanjutan dan dampaknya bagi lingkungan bisnis maupun masyarakat (Pramitha & Bandiyono, 2025). Pengungkapan *sustainability report* dapat membantu perusahaan memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan dan meningkatkan legitimasi di mata investor serta publik, sehingga berfungsi sebagai sarana komunikasi korporat yang strategis (Safitra & Tirayoh, 2025).

Aspek ekonomi dalam *sustainability report* diatur secara khusus dalam kelompok topik GRI 200, yang mencakup kinerja ekonomi (GRI 201), keberadaan pasar dan distribusi manfaat ekonomi (GRI 202), dampak ekonomi tidak langsung (GRI 203), praktik pengadaan (GRI 204), serta aspek tata kelola ekonomi seperti pencegahan korupsi (GRI 205), perilaku anti-persaingan (GRI 206), dan transparansi perpajakan (GRI 207). Secara keseluruhan, indikator-indikator tersebut dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana perusahaan mengelola dan mengungkapkan informasi ekonomi yang relevan bagi pemangku kepentingan dan pasar modal.

Meskipun adopsi *sustainability report* berbasis GRI terus meningkat, berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa kualitas dan kelengkapan pengungkapan yang disajikan perusahaan masih bervariasi, khususnya pada aspek ekonomi. Studi empiris menemukan bahwa penerapan standar GRI belum secara otomatis menjamin pengungkapan informasi ekonomi yang komprehensif dan konsisten, sehingga masih terdapat kesenjangan antara tujuan pelaporan keberlanjutan dan praktik pengungkapan yang dilakukan perusahaan (Ünlü & Öztürk, 2024; Chaerani et al., 2024). Beberapa indikator dalam GRI 200, seperti dampak ekonomi tidak langsung, praktik pengadaan, pencegahan korupsi, dan transparansi perpajakan, bahkan sering kali diungkapkan secara terbatas atau bersifat normatif tanpa dukungan informasi yang memadai (Tirtakusuma & Mais, 2025).

Isu tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan sektor transportasi dan logistik, mengingat sektor ini memiliki peran strategis dalam mendukung rantai pasok, mobilitas barang dan jasa, serta aktivitas ekonomi nasional secara luas. Karakteristik operasional yang kompleks, padat modal, melibatkan banyak pemangku kepentingan, serta berada dalam lingkup regulasi publik yang ketat menjadikan sektor ini penting untuk dianalisis dari perspektif pengungkapan aspek ekonomi keberlanjutan.

Namun demikian, penelitian terdahulu masih cenderung membahas *sustainability report* secara umum atau memadukan aspek ekonomi dengan dimensi lingkungan dan sosial, sehingga kajian empiris yang secara khusus dan komprehensif menganalisis seluruh indikator GRI 200 pada sektor transportasi dan logistik di Indonesia masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi, yaitu kurangnya kajian empiris yang secara sistematis menganalisis pengungkapan aspek ekonomi berdasarkan GRI 200 dari laporan keberlanjutan perusahaan sektor tersebut.

Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pengungkapan laporan keberlanjutan berdasarkan standar *Global Reporting Initiative* (GRI) 200 pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam kajian *sustainability report* dengan menyajikan analisis komprehensif pengungkapan aspek keberlanjutan ekonomi berdasarkan seluruh indikator GRI 200 (GRI 201–207) pada perusahaan sektor transportasi dan logistik di Indonesia. Penelitian ini memperkaya literatur dengan memfokuskan pada dimensi ekonomi yang masih relatif terbatas dikaji secara sektoral, serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan, regulator, dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas ekonomi melalui laporan keberlanjutan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Sustainability Report*

Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) merupakan sarana bagi perusahaan untuk mengungkapkan dampak aktivitas bisnisnya terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Menurut Global Reporting Initiative (2021), laporan keberlanjutan adalah praktik pengukuran dan pengungkapan kinerja keberlanjutan secara sistematis guna menilai komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab social dan lingkungan. Laporan ini tidak hanya bertujuan memenuhi kepatuhan, tetapi juga meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan pemangku kepentingan, serta memperkuat legitimasi bisnis (Agustina & Pradesa, 2024), sehingga menjadi instrumen penting dalam mendukung tata kelola dan pembangunan keberlanjutan.

### *Global Reporting Initiative (GRI) 200*

GRI 200 merupakan standar dalam kerangka *Global Reporting Initiative* yang mengatur pengungkapan aspek ekonomi perusahaan dalam laporan keberlanjutan, mencakup kondisi keuangan, kontribusi ekonomi, serta dampak aktivitas ekonomi terhadap pemangku kepentingan dan sistem ekonomi secara luas. GRI 200 menekankan bahwa kinerja ekonomi tidak hanya dipahami dari sisi finansial, tetapi juga dari bagaimana perusahaan menciptakan dan mendistribusikan nilai ekonomi serta mengelola dampak ekonominya secara berkelanjutan (Global Reporting Initiative, 2021).

Dalam GRI 200, standar GRI 201 berfokus pada kinerja ekonomi perusahaan, khususnya terkait nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan kepada pemangku kepentingan, termasuk implikasi finansial perubahan iklim, kewajiban imbalan pascakerja, serta bantuan pemerintah (Global Sustainability Standards Board, 2016). Selanjutnya, GRI 202 mengatur aspek keberadaan pasar yang mencerminkan daya saing upah dan kontribusi perusahaan terhadap ekonomi lokal melalui perbandingan upah minimum dan proporsi manajemen senior dari masyarakat lokal (Global Sustainability Standards Board, 2022). GRI 203 menyoroti dampak ekonomi tidak langsung yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan, seperti investasi infrastruktur dan dukungan layanan yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Global Sustainability Standards Board, 2016).

Aspek pengadaan diatur dalam GRI 204 yang menekankan transparansi proporsi belanja kepada pemasok lokal sebagai bagian dari upaya mendorong ekonomi inklusif dan praktik bisnis yang bertanggung jawab (Global Sustainability Standards Board, 2016). Selain itu, GRI 205 mengatur pengungkapan upaya pencegahan dan penanganan korupsi melalui identifikasi risiko, kebijakan, pelatihan, serta pelaporan insiden korupsi (Global Sustainability Standards Board, 2016). GRI 206 berfokus pada pengungkapan perilaku anti-persaingan, termasuk pelanggaran hukum terkait praktik monopoli atau kartel, sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap persaingan usaha yang sehat (Global Sustainability Standards Board, 2016). Terakhir, GRI 207 menekankan transparansi perpajakan melalui pengungkapan pendekatan pajak, tata kelola, manajemen risiko, keterlibatan pemangku kepentingan, serta pelaporan pajak per negara guna memperkuat akuntabilitas ekonomi perusahaan (Global Sustainability Standards Board, 2019).

## METODE

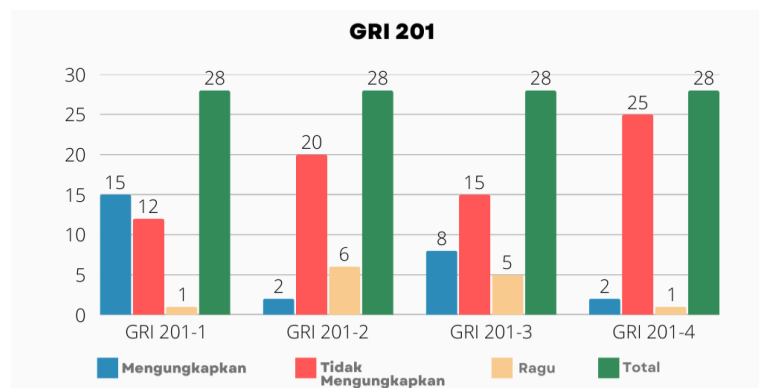
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi (*content analysis*) untuk menelaah pengungkapan aspek keberlanjutan ekonomi dalam laporan keberlanjutan perusahaan sektor transportasi dan logistik. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi serta memetakan tingkat dan karakteristik pengungkapan informasi ekonomi perusahaan secara sistematis, tanpa melakukan pengujian hubungan kausal antarvariabel (Gunawan et al., 2023). Objek penelitian yaitu perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari total 39 perusahaan dalam sektor tersebut, sebanyak 28 perusahaan memenuhi kriteria penelitian karena menerbitkan laporan keberlanjutan yang dapat dianalisis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keberlanjutan tahun 2023 yang dipublikasikan secara resmi melalui situs perusahaan dan situs BEI, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Analisis data dilakukan berdasarkan indikator standar *Global Reporting Initiative* (GRI) 200 yang mencakup GRI 201 hingga GRI 207. Setiap indikator dinilai menggunakan skema penilaian dikotomis yang dikembangkan menjadi tiga kategori, yaitu skor 1 apabila indikator diungkapkan sesuai ketentuan GRI, skor 0 apabila indikator tidak diungkapkan, dan kategori ragu apabila indikator diungkapkan namun tidak memenuhi persyaratan pelaporan masing-masing indikator. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran terstruktur mengenai tingkat pengungkapan aspek ekonomi perusahaan (Widianto & Koan, 2023). Peneliti ini menggunakan pedoman resmi GRI sebagai acuan utama dalam menyusun instrumen penilaian dan melakukan pemeriksaan silang antara informasi dalam laporan keberlanjutan dan laporan tahunan perusahaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengungkapan GRI 201: Kinerja Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis isi terhadap *sustainability report* 28 perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2023, tingkat pengungkapan GRI 201 menunjukkan variasi yang cukup jelas antar sub-indikator. Indikator dengan tingkat pengungkapan tertinggi adalah GRI 201-1, sedangkan indikator GRI 201-2 dan GRI 201-4 menunjukkan tingkat pengungkapan yang paling rendah.



Gambar 1. Diagram jumlah perusahaan dari hasil analisis 201 per indikator

Pada indikator GRI 201-1 (nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan) ada sebanyak 15 perusahaan (53,57%) mengungkapkan indikator ini secara eksplisit. Perusahaan-perusahaan tersebut umumnya menyajikan informasi pendapatan, distribusi nilai ekonomi kepada karyawan, pembayaran kepada pemerintah, serta kontribusi ekonomi lainnya dalam bentuk tabel atau uraian terstruktur. Sementara itu, 12 perusahaan (42,86%) tidak mengungkapkan indikator ini karena hanya menyajikan laporan keuangan tanpa mengaitkannya dengan kerangka nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan sebagaimana dimaksud dalam standar GRI. Selain itu, 1 perusahaan (3,57%) dikategorikan ragu karena meskipun menyajikan data keuangan, perusahaan tidak memisahkan atau menjelaskan distribusi nilai ekonomi kepada masing-masing pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaklengkapan pengungkapan GRI 201-1 lebih disebabkan oleh keterbatasan integrasi antara laporan keuangan dan *sustainability report*, bukan karena ketiadaan data ekonomi.

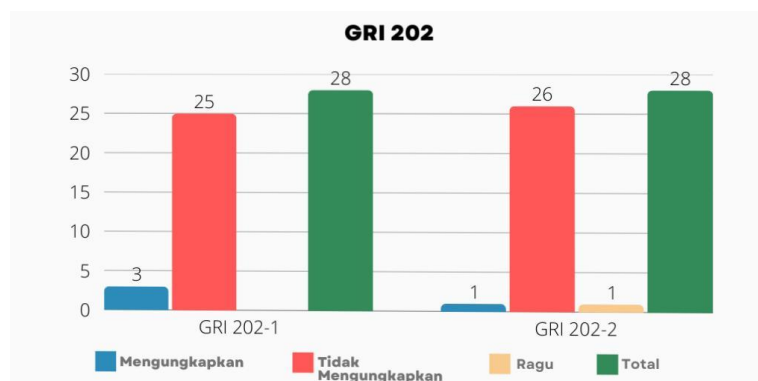
Pengungkapan indikator GRI 201-2 (implikasi finansial serta risiko dan peluang akibat perubahan iklim) masih sangat rendah. Hanya 2 perusahaan (7,14%) yang mengungkapkan indikator ini secara jelas dengan menjelaskan keterkaitan perubahan iklim terhadap risiko atau peluang ekonomi perusahaan. Sebaliknya, 20 perusahaan (71,43%) tidak mengungkapkan GRI 201-2 karena dalam *sustainability report* tidak ditemukan pembahasan mengenai dampak finansial perubahan iklim. Sebagian perusahaan menyatakan bahwa isu perubahan iklim belum dianggap berdampak material terhadap kinerja ekonomi perusahaan. Sementara itu, 6 perusahaan (21,43%) dikategorikan ragu karena hanya menyampaikan risiko lingkungan atau

keberlanjutan secara umum tanpa mengaitkannya dengan implikasi finansial. Temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya pengungkapan GRI 201-2 disebabkan oleh persepsi perusahaan yang masih memisahkan isu lingkungan dari aspek ekonomi.

Untuk indikator GRI 201-3 (kewajiban program pensiun dan imbalan pascakerja), sebanyak 8 perusahaan (28,57%) mengungkapkan informasi mengenai program pensiun atau kewajiban imbalan kerja, baik dalam bentuk nilai kewajiban maupun penjelasan skema pendanaan. Namun, 15 perusahaan (53,57%) tidak mengungkapkan indikator ini karena tidak menyajikan informasi terkait program pensiun dalam *sustainability report*, meskipun sebagian informasi tersebut tercantum dalam laporan keuangan. Selain itu, 5 perusahaan (17,86%) berada dalam kategori ragu karena hanya menyebutkan keberadaan program imbalan kerja tanpa rincian nilai kewajiban atau mekanisme pendanaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan pengungkapan GRI 201-3 lebih disebabkan oleh kurangnya pengalihan informasi dari laporan keuangan ke dalam konteks pelaporan keberlanjutan.

Indikator GRI 201-4 (bantuan finansial yang diterima dari pemerintah) merupakan indikator dengan tingkat pengungkapan terendah. Hanya 2 perusahaan (7,14%) yang mengungkapkan indikator ini secara eksplisit. Sebanyak 25 perusahaan (89,29%) tidak mengungkapkan GRI 201-4 karena dalam *sustainability report* tidak ditemukan informasi mengenai subsidi, insentif, atau bentuk bantuan pemerintah, baik dalam bentuk pernyataan menerima maupun tidak menerima bantuan. Selain itu, 1 perusahaan (3,57%) dikategorikan ragu karena hanya menyebutkan keterlibatan dengan pemerintah tanpa menjelaskan aspek bantuan finansial. Hal ini mengindikasikan bahwa rendahnya pengungkapan GRI 201-4 lebih disebabkan oleh kehati-hatian perusahaan atau anggapan bahwa informasi tersebut tidak relevan untuk disampaikan dalam laporan keberlanjutan.

### Pengungkapan GR1 202: Keberadaan Pasar

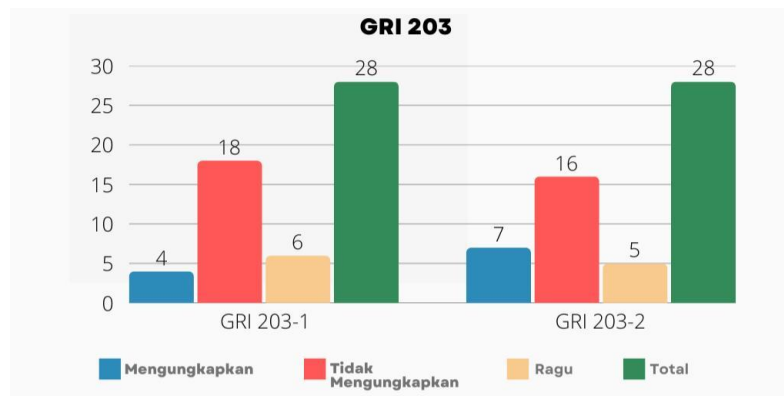


Gambar 2. Diagram jumlah perusahaan dari hasil analisis 202 per indikator

Pada indikator GRI 202-1 (rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional), hanya 3 perusahaan (10,71%) yang mengungkapkan indikator ini secara eksplisit. Perusahaan-perusahaan tersebut menyajikan informasi yang menunjukkan perbandingan antara upah karyawan entry-level dengan upah minimum yang berlaku, sehingga memenuhi kriteria pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam standar GRI. Sementara itu, sebanyak 25 perusahaan (89,29%) tidak mengungkapkan GRI 202-1 karena dalam *sustainability report* tidak ditemukan informasi terkait rasio upah karyawan entry-level terhadap upah minimum regional. Sebagian besar perusahaan hanya menyampaikan kebijakan umum terkait pengupahan atau kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan tanpa menyajikan perbandingan kuantitatif sebagaimana dipersyaratkan oleh GRI 202-1. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya pengungkapan indikator GRI 202-1 lebih disebabkan oleh keterbatasan penyajian data spesifik dalam laporan keberlanjutan, bukan karena ketiadaan kebijakan pengupahan di perusahaan.

Untuk indikator GRI 202-2 (proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal), hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada perusahaan (0%) yang mengungkapkan indikator ini secara lengkap. Seluruh 28 perusahaan (100%) dikategorikan dalam status ragu. Perusahaan umumnya menyebutkan praktik rekrutmen tenaga kerja lokal atau komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar. Namun demikian, perusahaan tidak menyajikan informasi kuantitatif mengenai proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam standar GRI 202-2. Dengan demikian, meskipun terdapat narasi terkait keterlibatan tenaga kerja lokal, tidak ditemukan informasi yang secara eksplisit memenuhi kriteria pengungkapan indikator ini. Status ragu diberikan karena adanya penyebutan rekrutmen lokal secara umum, tetapi tanpa rincian proporsi manajemen senior.

### Pengungkapan GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung



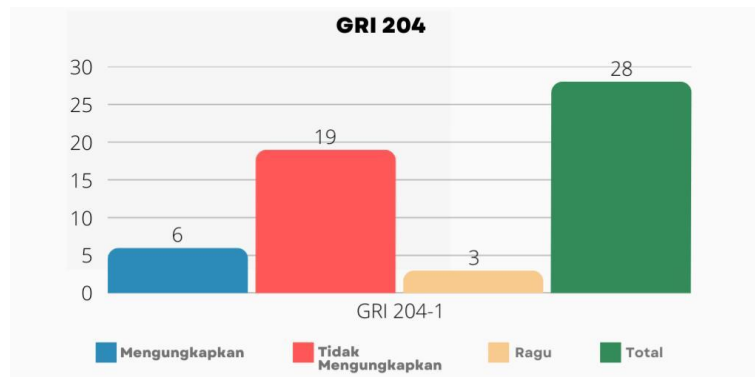
Gambar 3. Diagram jumlah perusahaan dari hasil analisis 203 per indikator

Pada indikator GRI 203-1 (investasi infrastruktur dan dukungan layanan), sebanyak 4 perusahaan (14,29%) mengungkapkan indikator ini secara eksplisit. Perusahaan-perusahaan tersebut menyajikan informasi mengenai investasi infrastruktur atau dukungan layanan yang dilakukan, serta menjelaskan bentuk kegiatan yang dapat dikaitkan dengan kontribusi ekonomi tidak langsung. Sementara itu, sebanyak 18 perusahaan (64,29%) tidak mengungkapkan GRI 203-1 karena tidak ditemukan informasi terkait investasi infrastruktur atau dukungan layanan dalam *sustainability report*. Perusahaan-perusahaan tersebut umumnya tidak menyajikan uraian mengenai investasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan ekonomi masyarakat atau wilayah operasional. Selain itu, terdapat 6 perusahaan (21,43%) yang dikategorikan ragu pada indikator GRI 203-1. Perusahaan menyatakan adanya kontribusi kepada masyarakat atau dukungan layanan, namun informasi yang disajikan bersifat umum dan tidak disertai rincian nilai investasi, lokasi kegiatan, maupun durasi manfaat yang dihasilkan. Beberapa perusahaan hanya menyebutkan kegiatan tanggung jawab sosial atau dukungan layanan tertentu tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam standar GRI. Kondisi ini menyebabkan pengungkapan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai pemenuhan indikator GRI 203-1 secara utuh.

Untuk indikator GRI 203-2 (dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan), hasil analisis menunjukkan bahwa 7 perusahaan (25,00%) mengungkapkan indikator ini secara eksplisit. Perusahaan-perusahaan tersebut menyajikan informasi mengenai dampak ekonomi dari aktivitas operasional, seperti kontribusi jasa transportasi atau logistik terhadap kelancaran distribusi, konektivitas wilayah, atau aktivitas ekonomi tertentu yang dinilai signifikan. Sementara itu, sebanyak 16 perusahaan (57,14%) tidak mengungkapkan indikator GRI 203-2 karena tidak ditemukan informasi terkait dampak ekonomi tidak langsung dalam *sustainability report*. Selain kategori tidak mengungkapkan, terdapat 5 perusahaan (17,86%) yang diklasifikasikan sebagai ragu pada indikator GRI 203-2. Perusahaan menyatakan bahwa aktivitas operasional memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat atau wilayah tertentu, namun

penjelasan tersebut disampaikan secara naratif tanpa ukuran dampak yang jelas, data penerima manfaat, atau indikator kuantitatif yang menunjukkan signifikansi dampak ekonomi. Dalam beberapa kasus, perusahaan hanya menyebutkan kontribusi umum terhadap sektor logistik, pelayaran, atau pendidikan tanpa mengaitkannya dengan dampak ekonomi tidak langsung yang terukur sebagaimana dipersyaratkan oleh standar GRI 203-2.

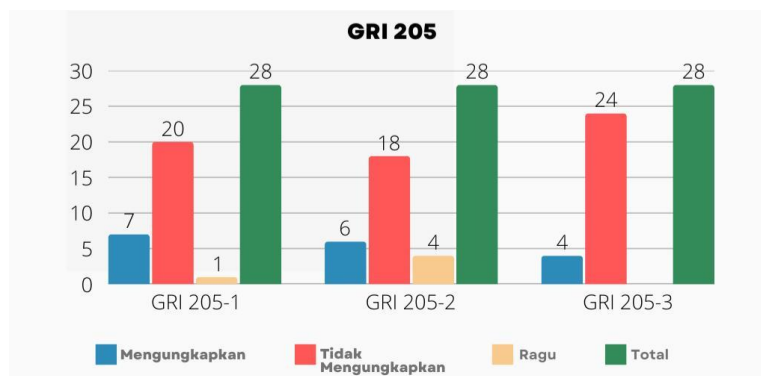
#### Pengungkapan GRI 204: Praktik Pengadaan



Gambar 4. Diagram jumlah perusahaan dari hasil analisis 204 per indikator

Pada indikator GRI 204-1 (proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal), terdapat 6 perusahaan (21,43%) yang mengungkapkan indikator ini secara eksplisit dengan menyajikan informasi pengadaan yang menunjukkan keterlibatan pemasok lokal, disertai data yang memungkinkan identifikasi proporsi atau persentase pengeluaran terhadap total belanja pengadaan. Informasi tersebut umumnya disampaikan dalam bentuk tabel pengadaan, persentase belanja lokal, atau uraian terstruktur yang mengaitkan nilai pengeluaran dengan total pengadaan perusahaan, sehingga telah memenuhi kriteria GRI 204-1. Sementara itu, 19 perusahaan (67,86%) tidak mengungkapkan indikator ini karena tidak ditemukan informasi terkait proporsi pengeluaran kepada pemasok lokal dalam *sustainability report*, dan perusahaan hanya menyampaikan uraian umum mengenai kebijakan pengadaan atau hubungan dengan mitra usaha tanpa pembedaan pemasok lokal dan non-lokal. Selain itu, 3 perusahaan (10,71%) dikategorikan ragu karena perusahaan menyatakan adanya kerja sama dengan pemasok lokal atau pengutamaan mitra usaha di wilayah operasional, namun informasi tersebut tidak dilengkapi dengan persentase pengeluaran terhadap total pengadaan, serta dalam beberapa kasus hanya menyajikan jumlah pemasok lokal atau nilai kontrak tertentu tanpa menjelaskan definisi pemasok lokal maupun keterkaitannya dengan total belanja pengadaan.

#### Pengungkapan GRI 205: Anti-Korupsi



Gambar 5. Diagram jumlah perusahaan dari hasil analisis 205 per indikator

Pada indikator GRI 205-1 (operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi), sebanyak 7 perusahaan (25,00%) mengungkapkan indikator ini dengan menjelaskan adanya proses penilaian risiko korupsi pada unit, aktivitas, atau area operasional tertentu. Pengungkapan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah mengidentifikasi potensi risiko korupsi dalam operasionalnya dan menyajikannya secara formal dalam laporan keberlanjutan. Sebaliknya, 20 perusahaan (71,43%) tidak mengungkapkan indikator ini karena tidak ditemukan informasi terkait penilaian risiko korupsi pada operasi perusahaan. Selain itu, 1 perusahaan (3,57%) dikategorikan ragu karena perusahaan menyatakan memiliki perhatian terhadap risiko korupsi, namun tidak menyampaikan cakupan, jumlah, atau persentase operasi yang dinilai berisiko, sehingga informasi yang disajikan belum memenuhi kriteria GRI 205-1 secara lengkap.

Pada indikator GRI 205-2 (komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan serta prosedur anti-korupsi), terdapat 6 perusahaan (21,43%) yang mengungkapkan indikator ini dengan menjelaskan pelaksanaan komunikasi atau pelatihan anti-korupsi kepada karyawan maupun pihak terkait, disertai informasi mengenai kelompok sasaran atau bentuk kegiatan yang dilakukan. Sementara itu, 18 perusahaan (64,29%) tidak mengungkapkan indikator ini karena tidak ditemukan informasi terkait pelaksanaan sosialisasi atau pelatihan anti-korupsi dalam laporan keberlanjutan. Selain itu, 4 perusahaan (14,29%) dikategorikan ragu karena perusahaan menyatakan memiliki kebijakan atau melakukan sosialisasi anti-korupsi, namun tidak menyajikan data mengenai jumlah peserta, persentase karyawan yang dilatih, atau cakupan pelatihan, sehingga pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria GRI 205-2.

Pada indikator GRI 205-3 (insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil), hanya 4 perusahaan (14,29%) yang mengungkapkan indikator ini dengan menyampaikan informasi mengenai adanya atau tidak adanya insiden korupsi yang terbukti, serta tindakan atau langkah yang diambil oleh perusahaan. Pengungkapan tersebut memberikan kejelasan mengenai sikap perusahaan dalam menangani isu korupsi. Sebaliknya, sebanyak 24 perusahaan (85,71%) tidak mengungkapkan indikator ini karena tidak ditemukan informasi terkait insiden korupsi maupun pernyataan ketiadaan insiden dalam laporan keberlanjutan, sehingga aspek transparansi terkait penanganan kasus korupsi belum disajikan secara eksplisit.

### Pengungkapan GRI 206: Perilaku Anti-Persaingan



Gambar 6. Diagram jumlah perusahaan dari hasil analisis 206 per indikator

Pada indikator GRI 206-1 (tindakan hukum terkait praktik anti-persaingan, anti-trust, dan monopoli), sebanyak 5 perusahaan (17,86%) mengungkapkan indikator ini dengan menyampaikan informasi mengenai ada atau tidaknya tindakan hukum terkait praktik anti-persaingan selama periode pelaporan. Sebanyak 21 perusahaan (75,00%) tidak mengungkapkan indikator ini karena tidak ditemukan informasi terkait tindakan hukum, kasus persaingan usaha, maupun pernyataan ketiadaan perkara anti-persaingan dalam *sustainability report*. Selain itu, terdapat 2 perusahaan (7,14%) yang dikategorikan ragu karena perusahaan menyatakan bahwa

kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau menjunjung prinsip persaingan usaha yang sehat, namun tidak disertai pernyataan eksplisit mengenai ada atau tidaknya tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam indikator GRI 206-1.

### Pengungkapan GRI 207: Perpajakan

Sama seperti GRI 206, hasil analisis isi terhadap *sustainability report* 28 perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2023, tingkat pengungkapan GRI 207 menunjukkan kelemahan yang sangat tinggi, dengan mayoritas kategori tidak mengungkapkan cukup besar.



Gambar 7. Diagram jumlah perusahaan dari hasil analisis 207 per indikator

Pada indikator GRI 207-1 (pendekatan terhadap pajak), hanya 1 perusahaan (3,57%) yang mengungkapkan indikator ini dengan menyampaikan informasi mengenai pendekatan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan. Perusahaan tersebut menjelaskan secara eksplisit bagaimana pajak diperlakukan dalam kebijakan perusahaan. Sementara itu, 27 perusahaan (96,43%) tidak mengungkapkan indikator ini karena tidak ditemukan informasi terkait kebijakan, prinsip, maupun pendekatan perusahaan terhadap pajak dalam *sustainability report*. Pada indikator GRI 207-2 (tata kelola, pengendalian, dan manajemen risiko pajak), terdapat 1 perusahaan (3,57%) yang mengungkapkan indikator ini dengan menjelaskan adanya atau pengawasan terhadap risiko perpajakan dalam struktur perusahaan. Sebaliknya, 27 perusahaan (96,43%) tidak mengungkapkan indikator ini karena tidak ditemukan informasi yang menjelaskan tata kelola, mekanisme pengendalian, ataupun manajemen risiko yang secara khusus dikaitkan dengan perpajakan.

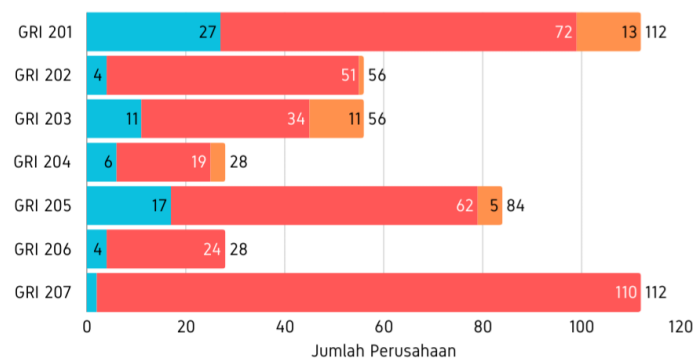
Untuk indikator GRI 207-3 (keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan perhatian yang berkaitan dengan pajak), tidak terdapat perusahaan yang mengungkapkan indikator ini. Seluruh 28 perusahaan (100,00%) tidak menyajikan informasi terkait keterlibatan pemangku kepentingan, komunikasi dengan otoritas pajak, maupun pengelolaan isu perpajakan dalam laporan keberlanjutan. Laporan perusahaan umumnya tidak memuat pembahasan mengenai hubungan atau dialog yang berkaitan dengan pajak. Pada indikator GRI 207-4 (pelaporan pajak per negara), seluruh 28 perusahaan (100,00%) juga tidak mengungkapkan indikator ini. Tidak ditemukan informasi mengenai pelaporan pajak yang dirinci berdasarkan negara atau wilayah operasi sebagaimana dimaksud dalam standar GRI 207-4. Informasi perpajakan yang disajikan, apabila ada, hanya bersifat umum dan tidak dipisahkan berdasarkan lokasi operasional perusahaan.

### Rekapitulasi Pengungkapan 200: Ekonomi

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa pengungkapan aspek ekonomi berdasarkan standar GRI 200 pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang dianalisis masih tergolong rendah dan belum merata. Dari total 28 perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* tahun 2023, sebagian besar pengungkapan masih terkonsentrasi pada indikator-indikator tertentu, sementara indikator lainnya belum diungkapkan secara memadai.

Tabel 2. Persentase keseluruhan hasil analisis pengungkapan GRI 200

| GRI                                    | Mengungkapkan | Tidak Mengungkapkan | Ragu   |
|----------------------------------------|---------------|---------------------|--------|
| GRI 201: Kinerja Ekonomi               | 24,11%        | 64,29%              | 11,61% |
| GRI 202: Keberadaan Pasar              | 7,14%         | 91,07%              | 1,79%  |
| GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung | 19,64%        | 60,71%              | 19,64% |
| GRI 204: Praktik Pengadaan             | 21,43%        | 67,86%              | 10,71% |
| GRI 205: Anti-Korupsi                  | 20,24%        | 73,81%              | 5,95%  |
| GRI 206: Perilaku Anti-Persaingan      | 14,29%        | 85,71%              | 0,00%  |
| GRI 207: Pajak                         | 1,79%         | 98,21%              | 0,00%  |



Gambar 8. Diagram jumlah perusahaan dari hasil analisis GRI 200

Dilihat dari masing-masing standar, GRI 201 (Kinerja Ekonomi) menunjukkan tingkat pengungkapan relatif paling tinggi dibandingkan standar GRI 200 lainnya, dengan persentase pengungkapan sebesar 24,11% atau setara dengan 27 dari 112 observasi. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan cenderung lebih konsisten dalam mengungkapkan informasi ekonomi yang berkaitan langsung dengan kinerja keuangan, seperti nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan. Namun demikian, tingginya persentase tidak diungkapkan (64,29%) dan masih adanya pengungkapan bersifat ragu (11,61%) menunjukkan bahwa kualitas dan kelengkapan informasi ekonomi yang disajikan belum optimal.

Sebaliknya, standar GRI 202 (Keberadaan Pasar) dan GRI 207 (Pajak) merupakan aspek dengan tingkat pengungkapan terendah. GRI 202 hanya menunjukkan persentase pengungkapan sebesar 7,14% atau 4 dari 56 observasi, sedangkan GRI 207 bahkan hanya 1,79% atau 2 dari 112 observasi. Mayoritas perusahaan tidak mengungkapkan informasi terkait rasio upah, keterlibatan manajemen lokal, maupun transparansi perpajakan secara eksplisit sesuai dengan indikator GRI. Rendahnya pengungkapan pada kedua standar ini mengindikasikan bahwa aspek distribusi manfaat ekonomi dan kontribusi pajak belum menjadi fokus utama dalam praktik pelaporan keberlanjutan perusahaan.

Untuk standar GRI 203 (Dampak Ekonomi Tidak Langsung) dan GRI 204 (Praktik Pengadaan), hasil analisis menunjukkan tingkat pengungkapan yang masih terbatas dan cenderung parsial. GRI 203 mencatat pengungkapan sebesar 19,64% atau 11 dari 56 observasi, sementara GRI 204 sebesar 21,43% atau 6 dari 28 observasi. Selain itu, persentase pengungkapan dengan kategori ragu pada GRI 203 cukup tinggi (19,64%), yang mengindikasikan bahwa perusahaan sering kali hanya menyampaikan informasi secara naratif tanpa dukungan data terukur sesuai kriteria GRI. Hal ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi tidak langsung dan praktik pengadaan berkelanjutan belum dilaporkan secara sistematis.

Sementara itu, standar GRI 205 (Anti-Korupsi) dan GRI 206 (Perilaku Anti-Persaingan) juga menunjukkan kelemahan dalam pengungkapan. GRI 205 hanya diungkapkan sebesar 20,24% atau 17 dari 84 observasi, sedangkan GRI 206 sebesar 14,29% atau 4 dari 28 observasi. Mayoritas perusahaan belum menyajikan informasi yang memadai mengenai penilaian risiko korupsi,

pelatihan kebijakan anti-korupsi, maupun kasus dan tindakan terkait persaingan usaha. Secara keseluruhan, rekapitulasi ini menegaskan bahwa meskipun perusahaan telah mengadopsi kerangka GRI dalam *sustainability report*, pengungkapan aspek ekonomi berdasarkan GRI 200 masih bersifat parsial dan memerlukan penguatan agar mampu mencerminkan dampak ekonomi perusahaan secara lebih utuh dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pengungkapan aspek ekonomi menggunakan standar *Global Reporting Initiative* (GRI) 200 pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa praktik pengungkapan masih belum merata dan cenderung bersifat parsial. Perusahaan relatif lebih konsisten dalam mengungkapkan indikator yang berkaitan langsung dengan kinerja ekonomi internal, khususnya pada standar GRI 201 tentang nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan, meskipun kualitas dan kelengkapannya masih belum optimal. Sebaliknya, standar GRI 202 mengenai keberadaan pasar dan GRI 207 mengenai transparansi perpajakan menunjukkan tingkat pengungkapan terendah, dengan sebagian besar perusahaan tidak menyajikan informasi sesuai indikator GRI. Sementara itu, pengungkapan pada standar GRI 203, GRI 204, GRI 205, dan GRI 206 juga masih terbatas dan sering kali bersifat normatif tanpa dukungan informasi terukur. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah mengadopsi kerangka GRI dalam laporan keberlanjutan, integrasi aspek ekonomi ke dalam *sustainability report* masih perlu diperkuat agar mampu mencerminkan akuntabilitas dan dampak ekonomi perusahaan secara lebih komprehensif sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I., & Pradesa, H. A. (2024). Praktek Pelaporan Keberlanjutan Di Indonesia: Sebuah Telaah Kritis Atas Literatur Terdahulu. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi Dan Perpajakan (Jemap)*, 7(1), 24–46. <https://doi.org/10.24167/jemap.v7i1.10947>
- Chaerani, E. Y., Juliyanto, D., & Firmansyah, A. (2024). Evaluasi Laporan Keberlanjutan Sektor Perbankan Atas Standar Global Reporting Initiative (GRI) 200: Pendekatan Analisis Konten. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(2), 305–316. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.740>
- Dewi, I. P., Ariani, K. R., & Kurniawati, L. (2025). Pengungkapan Sustainability Report: Peran Kinerja Keuangan, Good Corporate Governance, dan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 9(1), 61–79. <https://doi.org/10.18196/rabin.v9i1.24877>
- Global Reporting Initiative. (2021). *The GRI Standards A GUIDE FOR Table of contents*. <https://www.globalreporting.org/media/nmmnwfsm/gri-policymakers-guide.pdf>
- Global Sustainability Standards Board (GSSB). (2016a). *GRI 201: Kinerja Ekonomi 5*. [www.globalreporting.org/standards/](http://www.globalreporting.org/standards/).
- Global Sustainability Standards Board (GSSB). (2016b). *GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung*. [www.globalreporting.org/standards/](http://www.globalreporting.org/standards/).
- Global Sustainability Standards Board (GSSB). (2016c). *Gri 204: praktik pengadaan 2016 204*.
- Global Sustainability Standards Board (GSSB). (2016d). *GRI 205: Anti - Korupsi 2016 205*.

- Global Sustainability Standards Board (GSSB). (2016e). *GRI 206: perilaku anti -persaingan*.
- Global Sustainability Standards Board (GSSB). (2019). *Gri 207: pajak 2019*.
- Global Sustainability Standards Board (GSSB). (2022). *GRI 202: Keberadaan Pasar 2016 Standar Topik*.
- Gunawan, S., Situmorang, A. M., & Tjun, L. T. (2023). Analisis Pengungkapan Sustainability Report. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 5(1), 93–104.
- Mahesana, G. G. D., & Ratnadi, N. M. D. (2025). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Tekanan Investor dan Kepemilikan Manajerial Pada Kualitas Pengungkapan Dalam Sustainability Report*. 14(09), 1268–1277. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/>
- Pramitha, A. I. A., & Bandiyono, A. (2025). Dari Komitmen ke Transparansi: Mengungkap Pelaporan Keberlanjutan Standar GRI Topik pada Perusahaan E-Commerce di Indonesia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(4), 6865–6881. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i4.8354>
- Safitra, S. Y., & Tirayoh, V. Z. (2025). Pengaruh Pengungkapan Sustainability Index Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023) | Indonesian Journal of Economics, Management and Accounting. *Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting*, 2(2), 1498–1505. <https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema/article/view/1102>
- Tirtakusuma, A., & Mais, R. G. (2025). *GLOBAL*. 10(4), 1123–1129.
- Ünlü, B., & Öztürk, M. S. (2024). Sustainability Disclosures and Their Integration: Insights from Global Reporting Initiative (GRI) Standards. *European Journal of Digital Economy Research*, 4(2), 31–44.
- Wicaksono, A., & Bandiyono, A. (2025). Analisis Penerapan Akuntansi Keberlanjutan pada Perusahaan Pertambangan : Scooping Review. *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.47776/mizania.v5i1.1473>
- Widianto, J. I., & Koan, D. F. (2023). Content Analysis Aplikasi Nilai Sdgs Pada Csr Di Pt. Angkasa Pura I. *Calyptra*, 11(2). <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/5899%0Ahttps://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/download/5899/3901>